
Pembangunan Politik Jambi dibawah Kepemimpinan Fachrori Umar

Ratna Dewi¹, Dori Efendi², Ahmad Baidawi³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Jambi,

² Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

³ Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

Dratna376@yahoo.com, dori.efendi@unja.ac.id, ahmad.baidawi@unja.ac.id

Abstrak

Setelah terjadinya gerakan reformasi 1998 yang berhasil menjatuhkan Soeharto, perubahan mendasar terjadi di Indonesia yaitu pemerintahan menuju pada sistem pemerintahan yang demokrasi. Melalui sistem yang demokratis inilah Pemilihan Umum bisa dilaksanakan secara terbuka, jujur dan adil dan terbentuknya aturan pemilihan kepala daerah secara langsung. Begitu juga yang terjadi di provinsi Jambi. Pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Jambi telah diselenggarakan sejak tahun 2005 dan terpilihnya Zulkifli Nurdin sebagai gubernur pertama dalam pemilukada. Pada tahun 2010, terpilih Hasan Basri Agus dan 2016, terpilih Zumi Zola Zulkifli sebagai gubernur ketiga dalam pemilukada. Akan tetapi jabatan Zumi Zola tidak bertahan lama hanya sampai 2018 karena tersandung kasus korupsi ketok palu. Posisinya sebagai gubernur digantikan oleh wakil beliau yaitu Fachrori Umar. Permasalahan dari penelitian ini adalah Apakah dibawah kepemimpinan Fachrori Umar terjadi pembangunan politik? dan bagaimana bentuk pembangunan politik di bawah kepemimpinan Fachrori Umar? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan melakukan penentuan informan dengan membuat tabel matrix informan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan informan yang sudah dipilih dan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pembangunan politik dibawah kepemimpinan Fachrori Umar belum membawa kepada kemajuan politik di Provinsi Jambi. Faktor yang mempengaruhi dikarenakan terjadinya resesi kepemimpinan.

Kata Kunci: *Pembangunan Politik, Kepemimpinan, Provinsi Jambi*

Abstract

After the 1998 reform movement that succeeded in toppling Suharto. Fundamental changes occur in Indonesia, namely governance towards a democratic government system. Through this democratic system General Elections can be held openly, honestly and fairly and the formation of direct regional head election rules. The same thing happened in Jambi province. Direct regional head elections in Jambi Province have been held since 2005 and Zulkifli Nurdin was elected as the first governor in the post-conflict local election. In 2010, Hasan Basri Agus was elected and in 2016, Zumi Zola Zulkifli was elected as the third governor in the post-conflict local election. However, Zumi Zola's position did not last long until 2018 due to tripping over a hammer-knitting corruption case. His position as governor was replaced by his deputy, Fachrori Umar. The problem with this research is that under the leadership of Fachrori Umar there was political development? and what form of political development under the leadership of Fachrori Umar? This study uses a qualitative method with a case study approach, the source of data in this study are primary data and secondary data and determine informants by making informant matrix tables. Data collection techniques by interviewing selected informants and collecting documents related to research material. The conclusion of this paper is that political development has not led to political progress during the leadership of Fachrori Umar in Jambi Province. The influencing factor is due to the leadership recession.

Keywords: *Political Development, Leadership, Jambi Province*

1. LATAR BELAKANG

Konsep pembangunan politik mulai mendapat perhatian para sarjana pada awal tahun 1950. Terutama kepada negara dunia ketiga yang baru mendapat kemerdekaan dari kolonial. Hampir semua negara baru ini menjadi objek penelitian peneliti Barat karena negara-negara ini mengalami kemunduran ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kemiskinan, etnik, dan hak asasi manusia. Misalnya, Pye (1985) menulis negara-negara ini harus memusatkan sistem kekuasaan di tangan pemerintah pusat untuk menghindari terjadinya perpecahan dalam negara. Tetapi masalahnya, pemusatan kekuasaan ini menimbulkan masalah baru karena terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Begitu juga dengan Soeharto yang menggunakan tindakan represif dalam sistem pemerintahan dan militer sebagai penjaga kekuasaannya. Melalui tindakan represif inilah yang menyebabkan terpusatnya kekayaan negara kepada kroni orde baru. Menurut Vatikiotis (1998), pada tahun 1971 Soeharto melantik 100 orang anggota dewan, 2/3 gubernur dan 56 persen bupati dan walikota dari golongan militer; sekretaris menteri 84% dan hampir 50% jabatan duta besar adalah dari militer. Begitu juga dengan golongan birokrat, semuanya tunduk kepada perintah Soeharto dan militer untuk mendukung pemerintahan Orde Baru dan partai Golkar.

Terlepas dari kelemahan pemerintahan Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto pula, pembangunan politik terfokus kepada kestabilan ekonomi dan politik bagi mengatasi masalah yang ditinggalkan Soekarno yaitu inflasi, kemiskinan, kemunduran dan penyatuan integrasi nasional. Menurut Kingsbury (2005:42), persoalan ekonomi adalah masalah utama yang dihadapi Indonesia ketika era Soeharto. Ini karena Indonesia menanggung hutang yang tinggi yaitu sebanyak US\$2.39 miliar dan kemiskinan mencapai tahap 40.08%.

Setelah terjadinya gerakan reformasi dan berhasil menjatuhkan Soeharto pada bulan Mei 1998, perubahan mendasar terjadi di Indonesia yaitu pemerintahan menuju pada sistem pemerintahan yang demokrasi. Melalui sistem yang demokratis inilah Pemilihan Umum bisa dilaksanakan secara terbuka, jujur dan adil dan terbentuknya aturan pemilu kada. Begitu pun di provinsi Jambi. Pemilukada pertama kali terpilihnya Zulkifli Nurdin sebagai gubernur pertama dalam pemilukada 2005. Pada tahun 2010, terpilih Hasan Basri Agus dan Fachrori Umar dan Pada tahun 2016, terpilihnya Zumi Zola Zulkifli sebagai gubernur ketiga dalam pilkada di provinsi jambi tidak bertahan lama. Pada tahun 2018 jabatan Zumi Zola tidak bertahan lama karena tersandung kasus ketok palu. Posisinya sebagai gubernur digantikan oleh wakilnya yaitu Fachrori Umar. Dengan naiknya fachrori umar sebagai gubernur Jambi banyak perubahan yang terjadi di Provinsi Jambi termasuk gaya kepemimpinan.

Merujuk dari peralihan kepemimpinan tersebut, Fachrori Umar adalah pemimpin terlama sejak pemiluka pertama yaitu sejak tahun 2010, beliau adalah wakil gubernur, hingga 2018 menjadi gubernur. Fenomena ini pada tataran pembangunan politik dapat menganalisis bagaimana pertumbuhan ekonomi selama kepemimpinan Fachrori Umar. Terdapat hipotesis awal terkait pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto yang menunjukkan grafik persentasenya naik turun sejak 2013-2018.

Presentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

NO	Tahun	Persentase Pertumbuhan Ekonomi
1	2013	6,84 persen
2	2014	7,36 persen
3	2015	4,21 persen
4	2016	4,37 persen
5	2017	4,64 persen
6	2018	4,71 persen

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2019:32)

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 2018, tumbuh lebih cepat di angka 4,71 persen, dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 4,64 persen. Menurut BPS (2019), pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi berada disektor informasi dan telekomunikasi yaitu sebesar 7,74 persen sedangkan pertumbuhan terendah ada pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh melambat sebesar minus 0,14 persen. Dari pertumbuhan ekonomi tersebut secara data dapat dinilai bahwa pembangunan politik di bawah kepemimpinan Fachrori Umar menunjukkan terjadinya peningkatan ekonomi. Hal ini terjadi dapat dikatakan sebagai penerapan visi dan misi Jambi Tuntas yang mengutamakan kemajuan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Dari peralihan kepemimpinan di atas, penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian tersebut terhadap pembangunan politik di bawah kepemimpinan Fachrori Umar di Provinsi Jambi. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, masalah penelitian dan pelaksanaan penelitian secara objektif terhadap objek penelitian. Kajian ini ingin menjawab beberapa pertanyaan sebagai hipotesis awal yaitu: Apakah dibawah kepemimpinan Fachrori Umar terjadi pembangunan politik? Dan bagaimana bentuk pembangunan politik di bawah kepemimpinan Fachrori Umar? Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan masalah-masalah dalam pembangunan politik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul *Pembangunan Politik Jambidi Bawah Kepemimpinan Fachrori Umar*.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian mengenai bagaimana pembangunan politik di provinsi jambi dibawah kepemimpinan fachrori umar dan faktor-faktor yang memengaruhi gagalnya pembangunan politik dibawah kepemimpinan fachrori umar di Provinsi Jambi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono:2017). Penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai Pembangunan politik di Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Fachrori Umar. Informan merupakan individu atau orang-orang yang mampu memberikan informasi mengenai permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah di tentukan secara *purposive sampling* yang bertujuan peneliti memilih informan atau responden secara sengaja, yaitu mereka yang di anggap berkompeten atau dianggap tahu pasti tentang pembangunan politik dibawah kepemimpinan fachrori umar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif deskriptif yaitu analisis yang tidak berdasarkan perhitungan angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang digunakan secara deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data kualitatif, setelah di kelompokkan data tersebut dijabarkan dalam bentuk wacana sehingga lebih di mengerti, setelah itu dari wacana tersebut maka peneliti akan menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.Pembangunan Politik di Indonesia

Pembangunan politik merupakan bagian dari pembangunan nasional, dimana pembangunan itu ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga terciptanya suatu ketertiban politik. Pada zaman dulu manusia dihadapkan berbagai macam perubahan yang nyata dimana ia hidup. Lama-kelamaan, peristiwa tersebut merubah jadi beda yang terjadi didalam makhluk hidup. Evolusi artinya membuka gulungan atau membuka lapisan yang berasal dari bahasa latin. Didalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanaka dan dijalankan tanpa melalui sebuah kekerasan. Kemiskinan dan kelaparan mempunyai hubungan sangat erat dengan demokrasi. Kelaparan secara substansial tidak akan pernah terwujud dinegara manapun yang independen. Menurut pye, dalam pembangunan politik berkaitan dengan masalah partisipasi dalam kegiatan- kegiatan politik secara demokratis maupun totaliter.

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, “pembangunan” disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. Bagi penganut pandangan ini konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti pembangunan model kapitalisme, pembangunan model sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia. Dalam pengertian seperti ini, teori pembangunan berarti teori sosial ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menjadi pandangan yang menguasai hampir setiap diskursus mengenai sosial (Mansour:2009).

Sementara itu, di lain pihak terdapat suatu pandangan lebih minoritas yang berangkat dari asumsi bahwa kata “pembangunan” itu sendiri adalah sebuah *discourse*, suatu ideologi dan teori tentang perubahan sosial. Dalam pandangan ini konsep pembangunan sendiri bukanlah kata yang bersifat netral, melainkan suatu aliran dan keyakinan ideologis dan teoritis serta praktik mengenai perubahan sosial. Jika dilihat secara lebih mendalam dari pengertian dasarnya, pembangunan merupakan suatu istilah yang dipakai dalam bermacam-macam konteks, dan seringkali digunakan dalam konteks politik dan ideologi tertentu. Ada banyak kata yang mempunyai persamaan makna dengan kata pembangunan, misalnya perubahan sosial, pertumbuhan, progres, dan modernisasi. Dari kata-kata tersebut hanya perubahan sosial yang memberi makna perubahan ke arah yang lebih positif. Oleh karena itu makna pembangunan bergantung dari konteks siapa yang menggunakannya dan untuk kepentingan apa.

Dalam konteks pembangunan politik, pendidikan nasional selalu diindikasikan memiliki dua sisi yang dilematik. Pada satu sisi, keharusan untuk melaksanakan pendidikan nasional secara merata dan berkesinambungan memang perlu dilakukan, setidaknya agar setiap lapisan masyarakat (terutama di negara berkembang seperti Indonesia) menjadi lebih sadar politik, sadar hukum, serta sadar lingkungan dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan nasional mempunyai peran amat vital dalam mempersatukan bangsa (*nation building*).

Disisi lain, ketika pendidikan nasional telah menghasilkan sejumlah masyarakat terdidik, ketika itu pula konsep manusia seutuhnya menjadi mengemuka untuk dicarikan manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan nasional yang semula ditujukan bagi *nation building* ternyata tidaklah cukup dibangun di atas pertimbangan-pertimbangan formalitas pendidikan akademik saja melainkan harus juga berdasarkan pada tuntutan aspirasi politik yang diakibatkan oleh pendidikan akademik tersebut (Warsito: 1999). Masih dalam

konteks pembangunan politik, bahwa pendidikan nasional apalagi dalam sub sektor pendidikan tinggi, mau tidak mau harus dijadikan sarana strategis bagi kaderisasi pemimpin bangsa, karena dari tempat itulah sosok pemikir kemajuan bangsa dan negara dapat diharapkan muncul, terutama pada era komunikasi global yang menuntut daya saing yang amat ketat dan multidisipliner. Sekarang bukanlah era yang pantas mengharapkan pemimpin bangsa turun dari pertapaan dan menamakan dirinya sebagai ratu adil, melainkan saatnya memacu keterbukaan akal dan ketakwaan yang kompetitif untuk memajukan bangsa dan negara di tengah peradaban global yang tak lagi dapat dimanipulasi hanya oleh kekuasaan formal yang sifatnya sesaat.

Tak dimungkiri, salah satu harapan awal reformasi adalah perbaikan kualitas demokrasi. Dalam konteks Indonesia, pengukuran oleh *Freedom House* mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang bebas secara penuh, kendati kecenderungan demokrasinya beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi bahkan penurunan. Sementara *The Economist* lebih tegas mengkategorikan Indonesia ke dalam demokrasi yang masih “cacat” (*flawed democracy*).

Gismar dan Hidayat (2010) menyebutkan bahwa salah satu kelemahan mendasar dari proses reformasi yang berlangsung sejak 1998 adalah karena gerakan perubahan lebih berfokus pada upaya membangun dan memperbaiki institusi negara (*state institutions*). Sementara, upaya untuk membangun dan memperkuat kapasitas negara (*state capacity*) cenderung tidak mendapatkan perhatian yang seimbang. Konsekuensinya, “kehadiran negara” dalam kehidupan sehari-hari (*state in practice*) menjadi samar-samar atau bahkan dalam beberapa kasus cenderung “absen”.

Jika mengkaji data, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional 2013 sebesar 63,72 dari skala 0-100, angka ini naik 1,09 poin dibanding dengan IDI nasional 2012 sebesar 62,63. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Indonesia masih tetap berada pada kategori sedang. Perkembangan IDI dari 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi (2009) sebesar 67,30; 2010 sebesar 63,17, 2011 sebesar 65,48, 2012 sebesar 62,63 dan 2013 sebesar 63,72). Meskipun demikian, tingkat demokrasi Indonesia berdasarkan penghitungan Indeks sejak 2009 hingga 2013 tetap masih berada pada kategori sedang.

Demokrasi dalam banyak momentum, meminjam istilah Hardiman hanya melahirkan kaum predatorial oligarkis, akibat ide representasi dalam kenyataan politik bahwa mereka yang berhasil meraih kuasa legitim lewat pemilu dapat menyelewengkan kekuasaan tersebut. Bagaimana demokrasi yang mengandalkan representasi dan peranan partai-partai hanya

menghasilkan oligarki kekuasaan karena para wakil di parlemen de facto membangun suatu sistem otonom yang imun terhadap aspirasi publik yang mereka wakili. Aspirasi publik jelas lebih kompleks daripada aspirasi-aspirasi privat kalangan-kalangan tertentu, seperti perusahaan-perusahaan bisnis, dan elit-elit politik. Maka partai-partai dan lembaga-lembaga perwakilan sebagai sebuah sistem cenderung mereduksi kompleksitas dengan menghubungkan diri pada aspirasi-aspirasi privat kalangan-kalangan tersebut.

3.2. Pembangunan Politik Jambi di bawah Kepemimpinan Fachrori Umar

Sebagaimana diketahui Provinsi Jambi secara resmi menjadi Provinsi tahun 1958 berdasarkan Undang-undang No. 61 tahun 1958 tanggal 25 juni 1958, terletak secara geografis antara 0° 45' 2° 45' LS dan 101° 0' – 104° 55' BT, ditengah pulau sumatera mulai punggung tengah bukit Barisan membujur dari barat (litter W-Kabupaten Kerinci) ke arah timur sepanjang pantai timur (Ujung Jabung Tanjung Jabung Timur-berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan), dengan luas 53.435.72 Km², yang terdiri dari 98,82% daratan, 0,82% lautan dan 0,36% wilayah garis pantai, dalam artian sudah mengelola daerah sendiri selama ±61 tahun.

Pembentukan Provinsi melalui proses yang cukup rumit dan memiliki sejarah yang cukup panjang, sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. Diproses melalui Badan Kongres Rakyat Jambi (BKRD) dalam Kongres Rakyat Jambi (BKRD) pada tanggal 15 – 18 Juni 1956 mengatakan bahwa tuntutan mengenai status daerah Jambi menjadi daerah otonomi setingkat Provinsi merupakan tuntutan atas ketidakadilan (perimbangan keuangan) dan upaya penyelesaian konflik (perimbangan kekuasaan) karena dipadang dari segi geografis, sosiologis, politis dan ekonomi daerah Jambi telah dapat dan sudah selayaknya berotonomi sendiri setingkat Provinsi.

Provinsi jambi memiliki kekayaan potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, baik pertambangan, perkebunan, kehutanan, pertanian, wisata alam dan budaya dll, serta merupakan sebuah Provinsi di Pulau Sumatera yang kaya dan memiliki sumber Pendapatan Asli daerah yang memadai, bahkan merupakan salah satu Provinsi yang memiliki letak yang strategis kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT), bahkan nilai penting lainnya yang sangat mendukung investasi adalah dominan wilayah relatif aman bencana alam “gempa dan tsunami”. Dengan kekayaan alam dan peluang investasi yang baik seyogyannya membawa nilai positif dan konsekwensi logis kehidupan sosial ekonomi masyarakat Jambi lebih baik dari aspek pertumbuhan ekonomi, dengan komposisi Penduduk berdasarkan Pekerjaan, didominasi oleh Petani sebanyak 76,2%, Perdagangan sebanyak 13,1

% dan Jasa kemasyarakatan sebanyak 10,8%, menuju sebuah kesejahteraan yang menjadi cita-cita negara dalam proses pembangunan, yang dimulai dari sebuah proses demokrasi politik, baik demokrasi Pemilihan Pimpinan Daerah era orde baru maupun pola Pilkada era Reformasi, dengan tujuan utama adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Dalam konteks politik, Provinsi Jambi Sampai saat ini sudah memiliki 14 Gubernur baik pejabat Gubernur, baik ditunjuk, dipilih oleh DPRD maupun dipilih secara langsung melalui Pilkada Langsung, dari beberapa sumber data Gubernur Jambi dipilih secara langsung melalui pasangan calon Gubernur dimulai dari pasangan pemenang Pemilihan Gubernur yaitu tahun 2005-2010 yaitu Drs. H. Zulkifli Nurdin, MBA dan Drs. H. Antony Zeidra Abidin, dilanjutkan pada tahun 2010-2015 oleh pasangan Drs. H. Hasan Basri Agus, MM dan Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum, selanjutnya dilanjutkan pada tahun 2016-2020 oleh pasangan H. Zumi Zola Zulkifli, S.TP, MA dan Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum, karena ada persoalan kasus Pidana Korupsi dilanjutkan kepemimpinan Gubernur tahun 2018-2020 sebagai gubernur defenitif oleh Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum.

Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum. lahir di Bathin II Babeko, Bungo, Jambi, 23 November 1952. Selapas menamatkan SD di Jambi, Fachrori mulai merantau. Berangkat ke Bukittinggi Sumatera Barat untuk menempuh pendidikan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi selama 7 Tahun sampai 1971. Kemudian masih di Bukittinggi, dia melanjutkan pendidikan di IAIN Imam Bonjol, Bukit Tinggi sampai 1974. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan ke tanah Jawa, hingga mendapatkan gelar Doktor. Fachrori mengawali kariernya sebagai Hakim Pengadilan Agama Samarinda Provinsi Kaltim pada 1982–1984. Lalu menjadi ketua pengadilan Agama Bangko untuk selanjutnya menjadi Ketua Pengadilan Agama Kota Jambi. Kariernya di pemeirntahan ditutup dengan menjadi Ketua Pengadilan tinggi Agama Manado tahun 2008 sampai 2010, hingga akhirnya Fachrori terjun ke dunia politik dengan menjadi Wakil Gubernur periode 2010-2015, mendampingi Gubernur Jambi Hasan Basri Agus kala itu.

Pada pemilihan gubernur periode 2015-2020, fachrori umar berpasangan dengan zumi zola melawan petahana Hasan Basri Agus. Pada pemilihan tersebut pasangan zumi zola-fachrori umar kembali memenangkan pilkada provinsi jambi. Berjalannya waktu, pada tanggal 2 february 2018, zumi zola ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus suap ketuk palu berkaitan dengan proyek-proyek di provinsi jambi. Pada 10 April 2018 Fachrori dilantik sebagai PLT Gubernur Provinsi jambi dan Pada 13 February 2019, Fachrori Umar dilantik menjadi gubernur Jambi dengan seorang diri tanpa wakil Gubernur.

Dalam konteks pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan fachrori umar lumayan baik, hal itu misalnya pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Koperasi dan UKM di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi Dr Drs H Fachrori Umar M.Hum terus berupaya meningkatkan kinerja usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Upaya tersebut salah satunya diwujudkan dengan peluncuran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), di Kawasan jalan Pattimura Kota Jambi. Peluncuran PLUT ini bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi ke-73 dan hari UMKM Nasional kelima Tingkat Provinsi Jambi tahun 2020 (Jambione: 2020). Selain ekonomi, dalam bidang infrastruktur juga fachrori dikategorikan berhasil, hal itu terlihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur di provinsi jambi seperti perbaikan jalan, pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah tingkat kabupaten serta sarana dan prasarana jalan di beberapa desa di provinsi jambi.

Tetapi dalam konteks politik, nampaknya fachrori umar gagal dalam membangun politik di provinsi jambi. Hal itu bisa kita lihat pada pemilihan gubernur akhir 2020 nanti, yang mana fachrori umar kembali mendaftarkan diri untuk menjadi calon Gubernur Jambi. Namun apa yang diharapkan fachrori umar nampaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik yang menjadikannya sebagai wakil gubernur provinsi jambi yaitu partai Nasdem sebaliknya tidak mendukung fachrori umar sebagai kandidat calon gubernur jambi pada pilkada 2020 ini. Hal ini membuat para pengamat politik serta masyarakat jambi bertanya-tanya mengapa fachrori umar tidak mendapatkan dukungan dari partai politik yang sudah membesarkan namanya pada pilkada sebelumnya. Hal inilah yang menjadi kesimpulan dari peneliti bahwasanya pembangunan politik jambi dibawah kepemimpinan fachrori umar mengalami kegagalan.

4. KESIMPULAN

Pembangunan Politik Jambi dibawah kepemimpinan Fachrori Umar bisa dikatakan belum mampu membawa pada kemajuan politik. Hal itu didasarkan pada beberapa hal terutama dalam bidang pembangunan politik. Pembangunan politik merupakan bagian dari pembangunan nasional, dimana pembangunan itu ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga terciptanya suatu ketertiban politik serta mampu membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan seorang pemimpin sangatlah penting dalam sebuah pemerintahan dan politik. Sebaik apapun sistem politik kalau tidak diikuti oleh kepemimpinan yang baik maka pembangunan politik akan menjadi sia-sia. Maka dari itu kepemimpinan yang baik sangatlah dibutuhkan dalam proses membangun politik yang baik.

Daftar Pustaka

- Budiarjo, Miriam (1989), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2019). *Presentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi*.
- Fakih, Mansour (2009), *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insis Press.
- Huntington, S.P (1965). *Political development and political decay*. *World Politics* 17(3): 386-430.
- Huntington, S. P. 1968. *Political order in changing societies*. New Haven: Yale University Press.
- Ricklefs, M.C. 2008. *A history of modern Indonesia since, 1200-2008*. Edisi ke-5. Basingtoke: Palgrave.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana (2009). *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Warsito, Tulus (1999). *Pembangunan Politik Refleksi Kritis atas Krisis*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.